RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2022

RENCANA
KINERJA
TAHUNAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, meliputi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyusun dan menyampaikan Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Dan Informatika disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi Dan Informatika. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2022 memuat penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini diharapkan pencapaian target dan komitmen kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dapat lebih akuntabel.

Madiun, 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN

Drs. SAWUNG REHTOMO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700825 199003 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2022 merupakan pedoman operasional berisi program dan kegiatan beserta indikator kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana strategis tahunan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2022. Dalam pelaksanaanya, tentunya dengan mempertimbangkan input berupa sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang ada.

Selain itu bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dipakai sebagai dasar untuk pertanggungjawaban evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Berpedoman pada Renstra maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun telah menetapkan tujuan “Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik”.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) program, yaitu :

1) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
RINGKASAN EKSEKUTIF 5
DAFTAR ISI 6
DAFTAR LAMPIRAN 7
BAB I 8
PENDAHULUAN 8
1.1 PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ... **Error! Bookmark not defined.**
1.2 DASAR HUKUM 9
1.3 MAKSUT DAN TUJUAN 11
1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN 12
BAB II 14
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 14
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH 14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun 31
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FNGSI PERANGKAT DAERAH 33
BAB III 52
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 52
3.1.1. Kebijakan Kementerian Kominfo 52
3.1.2. Kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur .... **Error! Bookmark not defined.**
3.1.3. Kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Madiun **Error! Bookmark not defined.**
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika 53
3.3. Program dan Kegiatan 54
BAB IV PENUTUP 55
BAB V LAMPIRAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabel Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan merupakan hasil dari proses perencanaan kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Rencana Kinerja Tahunan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika 2022 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancagan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

12 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun;
22 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023;
23 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
24 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun;
25 Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran jangka pendek Perangkat Daerah yang diadopsi dari program kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra), sedangkan program dalam Renstra adalah program yang ada dan sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Maksud disusunnya RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2022 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan RKT Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2022;

2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
3. Memberikan pedoman dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun tahun 2022 meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi hasil pelaksanaan dan capaian Renja tahun 2021 merupakan pertimbangan yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2022. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2022.

Sebagaimana tertuang dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Masalah-masalah yang dihadapi dalam tahun lalu dan yang sedang berjalan
b. Sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
c. Tujuan yang akan dicapai sesuai dengan Renstra dan RPJMD;
d. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika;
e. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2021 tidak ada sub kegiatan yang mengalami refocusing. Tetapi ada satu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan sumber dana DBHCHT yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena terjadi kesalahan penempatan rekening kegiatan dan sub kegiatan pada saat penerimaan plafon anggaran di triwulan III, sehingga harus dirubah pada PAK 2021. Karena waktu pelaksanaan hanya 2 bulan sehingga kegiatan hanya terserap 28,44%.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dari hasil evaluasi yang tidak melebihi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan indikator Jumlah sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai yang diselenggarakan melalui tatap muka, media luar ruang, media sosial

3. Sub Kegiatan Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
5. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Derah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah
6. Sub Kegiatan Kemitraan dengan pemangku kepentingan dengan indikator kinerja jumlah informasi penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan melalui pemberitaan advetorial pada media massa.
7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah.

Beberapa sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika diatas tidak dapat mencapai target karena dipengaruhi oleh:

1. SDM yang terbatas.
2. Anggaran yang mengalami pergeseran.
3. Perubahan harga pada advetorial media massa.

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja/ sesuai dengan target kinerja yang telah direncakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
17. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
18. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
19. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
20. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
21. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

22. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
23. Program Penyelanggaraan Statistik Sektoral
24. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
25. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
26. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dengan indikator Jumlah data statistik sektoral yang tersedia
27. Program Penyelanggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
28. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
29. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
30. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
31. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dari hasil evaluasi yang melebihi target kinerja yang telah direncakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Derah Kabupaten/Kota dengan Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
7. Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dengan indikator Jumlah peserta yang ikut desiminasi informasi Pemerintah Daerah
8. Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
9. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dengan indikator Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun
10. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Beberapa program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika diatas dapat mencapai target atau bahkan ada yang melebihi target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM yang mendukung dan sarana prasarana yang memadai.
2. Tersedianya anggaran yang memadai
3. Adanya data yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan

Pada Tahun 2021 ada program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang capaian target kinerjanya kurang, ada yang sesuai dan ada yang melebihi.

Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Faktor capaian program/kegiatan tidak sesuai target	Faktor capaian program/kegiatan sesuai / melebihi target	Solusi yang dilakukan
1.	Terjadinya 3 kali pergeseran anggaran		Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang ada
2.	Perubahan harga pada advetorial media massa.		Memanfaatkan media sosial milik Pemkab Madiun untuk pelaksanaan desiminasi informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3.		Tersedianya SDM yang mendukung dan sarana prasarana yang memadai yang dapat mendukung pelaksanaan program kegiatan	Memanfaatkan SDM yang ada dengan terus memberikan motivasi kerja agar dapat berkinerja baik

4.		Tersedianya anggaran yang memadai	Melaksanakan aktivitas sub kegiatan dengan seefeisien mungkin, sesuai dengan anggaran yang ada
5.		Tersedianya data yang mendukung	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Implikasi yang timbul terhadap capaian target program kegiatan antara lain mempercepat implementasi Satu Data Indonesia, mempercepat desiminasi informasi Pemerintah Daerah, mempercepat pengembangan dan penyediaan insfrastruktur TIK, peningkatan keamanan informasi.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja yang kurang dari target antara lain:

1. Memanfaatkan TIK dalam mengadakan kegiatan-kegiatan rapat atau bimtek (dengan vidcon) sehingga kegiatan masih dapat dilaksanakan walaupun anggaran makan minum rapat tekena refocusing anggaran.
2. Pengembangan Aplikasi didukung oleh SDM bidang TIK yang ada. Mereka menciptakan beberapa aplikasi ringan yang dapat mendukung kinerja Pemkab Madiun. Jadi meskipun anggaran pengembangan aplikasi terkena refocusing tetapi capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan.
3. Memanfaatkan SDM yang ada dengan terus memberikan motivasi kerja agar dapat berkinerja baik.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2021
Kabupaten Madiun

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
SEBELUM PERUBAHAN														
					KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.10	2.10	01.	01		**Dinas Komunikasi dan Informatika**									
				08	**Program Pelayanan Kesekretariatan**	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)	90	100	100	100	100			
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	A	A	100%			
				08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%			
				08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100%			
2.10	2.10	01.01	19		**Program Tata Kelola E-Government dan Infrastruktur Jaringan TI dan Komunikasi**	Presentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik	19%	19%	19%	19%	100%			

				04	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan sarana Prasarana Teknologi Informasi	Jumlah jaringan internet dan sarpras TI yang terpasang dan terpelihara	53 titik	53 titik	53 titik	53 titik	100%			
						Jumlah OPD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun	39 PD		32 PD	29 PD	90,63%			
				01	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan sarana Prasarana Teknologi Informasi (Covid 19 New Normal)	Jumlah peralatan peningkatan fasilitas ruang server yang terpasang			1.157 unit	1.157 unit	100%			
				03	Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah kebijakan yang mendukung tata kelola e Gov	5 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	2 kebijakan	200%			
						Jumlah Pengembangan kapasitas SDM di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	20 orang	5 orang	5 orang	6 orang	120%			
						Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	53 PD	53 PD	43 PD	43 PD	100%			
				05	Pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi e-Government yang dibangun & dikembangkan	15 aplikasi	87 aplikasi	3 aplikasi	11 aplikasi	366%			
						Jumlah desa/ kel yang dilatih dalam pemanfaatan TIK	90 desa/kel	27 desa/kel	15 desa/kel	15 desa/kel	100%			
2.10	2.10	.01.01	.20		**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik	1050 berita		250 berita	600 berita	240%			
				01	Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah Wartawan yang mengikuti Diseminasi Pemerintah Daerah	500 orang	100 orang	100 orang	175 orang	175%			

						Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan melalui Pemberitaan Advertorial pada Media Massa	750 berita	150 berita	150 berita adv	40 berita adv	26%			
				03	Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM	Jumlah Dokumen LPPL Radio Puroboyo FM	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	300%			
						Jumlah Dialog Interaktif	50 kali	8 kali	10 kali	4 kali	40%			
				04	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen PPID Pembantu yang Tersusun	56 dok		10 dokumen	56 dokumen	560%			
				06	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Informasi melalui Media Luar Ruangan	260 buah	137 buah	50 buah	36 buah	72%			
						Jumlah Cetak Kalender	9.250 eks	1.850 eks	1.850 eks	1.725 eks	93%			
2	15				**Urusan Persandian**									
02.15	02.10	01.01	16		**Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi**	Persentase PD yang telah melakukan pengklasifikasian informasi	100%	26,50%	47,54%	45%	94,50%			
				2	Penyusunan Kebijakan Persandian	Jumlah kebijakan persandian yang tersusun	4 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	200%			
				03	Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Jumlah Jaring Komunikasi Sandi (JKS) berbasis Radio HT yang tersedia	21 unit	1 unit	6 unit	7 unit	116%			
				01	Operasional Pengamanan Informasi Persandian	Perangkat Daerah yang dinilai melalui IT Security Assesment	8 PD	2 PD	2 PD	2 PD	100%			
				05	Pengelolaan Sumber Daya Persandaian (Covid New Normal)	Jumlah Peserta Sosialisasi CISRT			10 orang	10 orang	100%			
2	14				**Urusan Statistik**									
2.14	2.10	.01	01.15		**Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid**	**90%**	**80%**	**80%**	**85%**	**106,25%**			
				18	Kompilasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	20 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			

						Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan	7 kali		1 kali	1 kali	100%			
				20	Penyusunan Data Statistik Kewilayahan	Jumlah Dokumen Statistik kewilayahan yang tersusun	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	80%			
				17	Pengembangan Pusat Data Statistik Sektoral	Jumlah Peserta Pelatihan	130 orang	70 orang	75 orang	75 orang	100%			
						Jumlah Dokumen Statistik yang tersusun	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%			
				22	Forum Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Peraturan Bupati yang Tersusun	1 perbup		1 perbup	1 perbup	100%			
						Jumlah Data Dashboard yang Tersedia	36 sektor		36 sektor	36 sektor	100%			
SETELAH PERUBAHAN														
					KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
					Dinas Komunikasi dan Informatika									
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**1. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**77**	**77**	**100**
						2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**A**	**BB**	**A**	**A**	**100%**	**80,01**	**81,70**	**102**
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100%	21 dokumen	22 dokumen	104,76
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan bidang komunikasi, aplikasi informatika, persandian dan statistik yang tersusun	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100%	21 dokumen	22 dokumen	104,76
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah diseminasi informasi publik terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai yang sesuai dengan strategi komunikasi yang ditetapkan						200 informasi	70 informasi	46,67%

					Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Cetak kalender Pemkab Madiun						1700 exp	1700 exp	100%
						Jumlah sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai yang diselenggarakan melalui tatap muka, media luar ruang, media sosial						200 informasi	70 informasi	46,67%
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Paket					3 Paket	4 Paket	133,33%
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan logistik kantor yang tersedia	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	2 paket					3 paket	2 paket	66,67
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	2 paket					3 paket	2 paket	66,67
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%

					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor (tenaga keamanan, kebersihan, resepsionis, administrasi dan pengemudi)	8 orang					8 orang	8 orang	100%
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin yang terpelihara	20 unit					20 unit	19 unit	95%
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit					1 unit	1 unit	100%
					Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE**	**100%**					**100%**	**100%**	**100%**
					Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain Perangkat Daerah	53 PD	53 PD	43 PD	43 PD	100%	53 PD	53 PD	100%
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun	39 PD		32 PD	29 PD	90,63%	32 PD	53 PD	165,62%
					Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	100%					100%	100%	100%
					Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e Government	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	2 kebijakan	200%	1 kebijakan	1 kebijakan	100%

						Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang TIK	5 orang	5 orang	5 orang	6 orang	120%	5 orang	5 orang	100%
						Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	53 PD	53 PD	43 PD	43 PD	100%	53 PD	53 PD	100%
					Pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi e-Government yang dibangun & dikembangkan	3 aplikasi	87 aplikasi	3 aplikasi	11 aplikasi	366%	3 Aplikasi	8 Aplikasi	266,67%
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	**Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**	**100%**					**100%**	**100%**	**100%**
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Derah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun	350 informasi					300 informasi	1.644 informasi	548%
						Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah	150 berita	150 berita	150 berita adv	40 berita adv	26%	150 berita	106 berita	70,67%
					Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Wartawan yang mengikuti Diseminasi Pemerintah Daerah	75 orang	100 orang	100 orang	175 orang	175%	75 orang	109 orang	145,33%
						Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan melalui Pemberitaan Advertorial pada Media Massa	150 berita	150 berita	150 berita adv	40 berita adv	26%	150 berita	106 berita	70,67%
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek/Monev PPID yang dilaksanakan	1 kali					1 kali	1 kali	100%
						Jumlah kelembagaan KIM yang dibentuk	15 KIM	15 KIM	15 KIM	9 KIM	60%	15 KIM	15 KIM	100%
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi melalui Media Luar Ruangan	60 buah	137 buah	50 buah	36 buah	72%	50 buah	94 buah	188%
					Urusan Persandian									
					Penyelanggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	**Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**100%**					**100%**	**100%**	**100%**
					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi	100%					100%	100%	100%

					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi kebijakan Persandian yang dilaksanakan	1 Kali					1 Kali	1 Kali	100%
					Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Jumlah Jaring Komunikasi Sandi (JKS) berbasis Radio HT yang tersedia	21 unit	1 unit	6 unit	7 unit	116%			
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan informasi Perangkat Daerah	53 PD					53 PD	53 PD	100%
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana yang diamankan	6 Unit					6 Unit	6 Unit	100%
					Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan	3 Unit					3 Unit	7 Unit	233,33%
					Urusan Statistik									
					Penyelanggaraan Statistik Sektoral	**Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid**	**90%**	**80%**	**80%**	**85%**	**106,25%**	**85%**	**85%**	**100%**
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%					100%	100%	100%
						Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	1 sektor					1 sektor	1 sektor	100%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	4 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	36 sektor					36 sektor	36 sektor	100%
						Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun	1 dokumen					1 dokumen	3 dokumen	300%

2.2.ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dapat dikatakan berhasil mengemban misinya jika implementasi tugas pokok dan fungsi sesuai target dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra serta sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel T.C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

INDIKATOR KINERJA	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	TERGET RENSTRA OPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE		PROYEKSI	
				2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sebelum Perubahan											
Perangkat daerah yang menerapkan layanan SPBE					10 PD					10 PD		
Presentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik				19%	19%				19%	19%		
Jumlah OPD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun					32 PD					29 PD		
Jumlah jaringan internet dan sarpras TI yang terpasang dan terpelihara				53 titik	53 titik				53 titik	53 titik		

Jumlah kebijakan yang mendukung tata kelola e Gov				1 kebijakan	1 kebijakan				1 kebijakan	2 kebijakan		
Jumlah Pengembangan kapasitas SDM di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				5 orang	5 orang				5 orang	5 orang		
Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah					43 PD					43 PD		
Jumlah aplikasi e-Government yang dibangun & dikembangkan				3 aplikasi	3 aplikasi				87 aplikasi	11 aplikasi		
Jumlah desa/ kel yang dilatih dalam pemanfaatan TIK				15 desa/kel	15 desa/kel				27 desa/kel	15 desa/kel		
Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik					250 berita					600 berita		

Jumlah Wartawan yang mengikuti Diseminasi Pemerintah Daerah				100 orang	100 orang				100 orang	175 orang		
Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan melalui Pemberitaan Advertorial pada Media Massa				150 berita	150 berita				150 berita	40 berita		
Jumlah Dokumen LPPL Radio Puroboyo FM				1 dokumen	1 dokumen				2 dokumen	3 dokumen		
Jumlah Dialog Interaktif				10 kali	10 kali				8 kali	4 kali		
Jumlah Dokumen PPID Pembantu yang Tersusun				10 dokumen	10 dokumen					56 dokumen		
Jumlah Informasi melalui Media Luar Ruang				50 buah	50 buah				137 buah	36 buah		
Jumlah Cetak Kalender				1.850 eks	1.850 eks				1.850 eks	1.725 eks		
Persentase PD yang telah melakukan pengklasifikasian informasi				27,87 %	47,54 %				26,50 %	45%		

Jumlah kebijakan persandian yang tersusun					1 dokumen					2 dokumen		
Jumlah Jaring Komunikasi Sandi (JKS) berbasis Radio HT yang tersedia					1 unit	6 unit			1 unit	7 unit		
Perangkat Daerah yang dinilai melalui IT Security Assesment					2 PD	2 PD			2 PD	2 PD		
Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid				80%	80%				80%	85%		
Jumlah Dokumen Statistik Sektoral				1 dokumen	1 dokumen				5 dokumen	1 dokumen		
Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan					1 kali					1 kali		
Jumlah Dokumen Statistik Sektoral yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen				5 dokumen	1 dokumen		
Jumlah Peserta Pelatihan				55 orang	75 orang				70 orang	75 orang		
Jumlah Dokumen Statistik yang tersusun					1 dokumen					1 dokumen		

Peraturan Bupati yang Tersusun					1 perbup					1 perbup		
Jumlah Data Dashboard yang Tersedia					36 sektor					36 sektor		
	Sesudah Perubahan											
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE						100%	100%	100%		100%	100 %	100%
Jumlah Nama Domain Perangkat Daerah						53 PD	53 PD	53 PD	43 PD	53 PD	53 PD	53 PD
Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kabupaten Madiun						32 PD	32 PD	32 PD	29 PD	53 PD	32 PD	32 PD
Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus		100 %				100%	100%	100%		100%	100 %	100%
Presentase Service Level Agrement						100%	100%	100%		99%	100 %	100%

Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah						53 PD	53 PD	53 PD	43 PD	53 PD	53 PD	53 PD
Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e Goverment						1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan
Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang TIK						5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang
Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan						3 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	11 Aplikasi	8 Aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi
Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		100 %				100%	100%	100%		100%	100 %	100%
Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun						300 informasi	325 informasi	350 informasi		1.644 informasi	325 informasi	350 informasi

Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah						150 informasi	150 informasi	150 informasi	40 informasi	106 informasi	150 informasi	150 informasi
Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Pemerintah Daerah						75 orang	75 orang	75 orang	100 orang	109 orang	75 orang	75 orang
Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan melalui Pemberitaan Advertorial pada Media Massa						150 berita	150 berita	150 berita	40 berita	106 berita	150 berita	150 berita
Jumlah Informasi melalui Media Luar Ruang						50 buah	50 buah	60 buah	36 buah	94 buah	50 buah	60 buah
Jumlah Bimtek dan monev PPID yang dilaksanakan						1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali
Jumlah Kelembagaan KIM yang terbentuk						15 KIM	15 KIM	15 KIM	9 KIM	15 KIM	15 KIM	15 KIM

Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah						100%	100%	100%		100%	100 %	100%
Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi						100%	100%	100%		100%	100 %	100%
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Persandian yang dilaksanakan						1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali
Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah						53 PD	53 PD	53 PD		53 PD	53 PD	53 PD
Jumlah Sarana Prasarana yang diamankan						6 unit	6 unit	6 unit		6 unit	6 unit	6 unit
Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan						3 unit	3 unit	3 unit		3 unit	3 unit	3 unit
Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid						85%	85%	90%		85%	85%	90%

Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100 %				100%	100%	100%		100%	100 %	100%
Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi						1 sektor	1 sektor	1 sektor		1 sektor	1 sektor	1 sektor
Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia						5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Jumlah data statistik sektoral yang tersedia						36 sektor	36 sektor	36 sektor		36 sektor	36 sektor	36 sektor
Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan isu komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yaitu:

1. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Madiun, terdapat isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Madiun yang terkait dengan kinerja Dinas Kominfo yaitu Tata Kelola Pemerintahan belum optimal khususnya pada sektor pelayanan publik, hal ini disebabkan oleh sistem mekanisme pelayanan publik belum berjalan baik serta sistem informasi manajemen (E-Goverment) pelayanan publik belum terintegrasi
2. Pandemi Covid-19,

   Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat *social distancing* dan *physical distancing*, sehingga menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting, sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut, diantaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Dengan diterapkannya teknologi informasi dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya serta tenaga, dan tanpa disadari bahwa kehidupan manusia saat ini telah memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi.
3. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai **upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa**. Arahan tersebut direalisasikan **dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional** melalui 5 (lima) langkah yaitu

mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.

4. Pengembangan dan pemberdayaan KIM berbasis TIK
5. Keterbukaan Informasi Publik
6. Peningkatan Keamanan Informasi
7. Terwujudnya satu data Kabupaten Madiun yang terintegrasi.

Bedasarkan Sesuai Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian
c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi antara lain

a. Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah, terkendala jarak pengguna layanan yang jauh dan luas, sehingga membutuhkan dana yang besar dan mengakibatkan target untuk mempunyai jaringan intra pemerintah yang benar benar lokal sulit terwujud
b. Dalam penyelenggaraan satu data indonesia belum ada pedoman dan sinergitas elemen data dari Pusat dan Provinsi terkait Prinsip Satu Data
c. Kurangnya SDM Persandian dan Pengamanan Informasi
d. Kurangnya peran aktif Tim Koordinasi SPBE dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya dalam hal kecukupan data
e. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018–2023, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Madiun yaitu ***"Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, dan***

Berakhlak" Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Madiun, yaitu:

MISI I Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun

MISI 2 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik

MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelenjutan

MISI 4 Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan

MISI 5 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun memiliki isu strategis sebagai garda depan Urusan komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-2 Kabupaten Madiun yaitu:

Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan urusan komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang terampil dan profesional
b. Minimnya sarana prasarana di bidang TIK dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
c. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

a. Pelatihan pengembangan di bidang TIK
b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2022

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

   Lahirnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipas masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar instansi bertindak sebagai penggerak utama

SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar pemerintah. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas.

b. Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Madiun mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data perencanaan, pelaksanaan,dan evaluasi di Kabupaten Madiun.

c. Meningkatkan keterbukaan informasi publik

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi publik merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik.

d. Meningkatkan keamanan informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Kemanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya kemanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntuttan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mempunyai strategi meningkatkan keamanan informasi

sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program, perkegiatan dan per sub kegiatan adalah sebaimana tabel berikut.

Tabel T-C 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**Dinas Kominfo**				**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**Dinas Kominfo**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**83**	**8.180.010.512**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**83**	**14.589.960**	
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)	**88**				**Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)**	**88**	**7.291.318.017**	
	Administrasi keuangan perangkat daerah		**Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah**	**1 tahun**	**4.024.641.406**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**		**Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**4.022.491.858**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	4.024.641.406	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	**4.022.491.858**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah diseminasi informasi publik terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai yang sesuai dengan strategi komunikasi yang ditetapkan**	**50 informasi**	**3.268.524.750**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah diseminasi informasi publik terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai yang sesuai dengan strategi komunikasi**	**50 informasi**	**2.308.240.000**	

								yang ditetapkan			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Cetak kalender Pemkab Madiun	1667	3.268.524.750	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Cetak kalender Pemkab Madiun	1667	2.308.240.000	
			Jumlah sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai yang diselenggarakan melalui tatap muka, media luar ruang, media sosial	50 kali				Jumlah sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai yang diselenggarakan melalui tatap muka, media luar ruang, media sosial	50 kali		
	Administrasi umum perangkat daerah		**Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi**	**12 Bulan**	**453.010.209**	**Administrasi umum perangkat daerah**		**Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi**	**12 Bulan**	**479.111.783**	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	95.910.507	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 paket	154.776.875	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	1 tahun	122.668.231	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kebutuhan logistik kantor yang tersedia	12 Bulan	136.482.148	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan/ penggandaan	1 tahun	36.837.851	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 Bulan	12.128.740	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	6.334.020	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	12 Bulan	6.334.020	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 tahun	191.259.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	169.390.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia**	**2 paket**	**7.167.220**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia**	**2 paket**	**7.487.384**	
	Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Terpenuhinya kebutuhan sarpras gedung kantor dan lainnya	1 tahun	7.167.220	Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	**2 paket**	**7.487.384**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah barang milik negara yang terpelihara**	**12 bulan**	**225.306.680**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah barang milik negara yang terpelihara**	**12 bulan**	**279.652.980**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		Terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas/ operasional lapangan	1 tahun	121.564.501	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		Jasa pemeliharaa n, biaya pemeliharaa n, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	12 Bulan	129.161.445	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	1 tahun	3.187.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah peralatan kantor dan mesin yang terpelihara	20 unit	25.190.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya		Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 tahun	100.554.379	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 buah	125.301.535	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 Bulan**	**184.428.555**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 Bulan**	**194.334.012**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon		Tercukupinya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	79.405.020	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon	12 Bulan	64.406.464	

	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tercukupinya biaya pelayanan umum kantor	1 tahun	105.023.535	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor (tenaga keamanan, kebersihan, resepsionis, administrasi dan pengemudi)	8 orang	129.927.548	
	Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		**Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun**	**21 dokumen**	**16.931.692**	**Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun**	**21 dokumen**	**14.589.960**	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Tersedianya dokumen perencanaan bidang kominfo, statistik dan persandian	1 tahun	16.931.692	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan bidang komunikasi, aplikasi informatika, persandian dan statistik yang tersusun	21 dokumen	14.589.960	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE**	**100%**	**1.356.760.344**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**		**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE**	**100%**	**2.050.012.389**	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Nama Domain Perangkat Daerah**	53 PD	462.394.879	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Nama Domain Perangkat Daerah**	53 PD	1.207.970.000	

	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah jaringan internet dan sarpras TI yang terpasang dan terpelihara	53 titik	462.394.879	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun	32 PD	1.207.970.000	
			Jumlah OPD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kabupaten Madiun	39 OPD							
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota		**Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus**	**100%**	**894.365.465**	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota**		**Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus**	**100%**	**824.042.389**	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah pengelolaan pusat data pemerintah daerah	1 paket	560.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Presentase Service Level Agrement	100%	528.374.445	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	46PD	79.929.360	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	53 PD	93.002.400	
			Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e-Government	1 Kebijakan				Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e-Government	1 Kebijakan		
			Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di bidang TIK	5 orang				Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di bidang TIK	5 orang		

	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah aplikasi e-Government yang dibangun & dikembangkan	2 Aplikasi	254.436.105	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah aplikasi yang dibangun & dikembangkan	3 Aplikasi	220.665.544	
			Jumlah desa/kel yang dilatih dalam pemanfaatan TIK	20 desa/kel							
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		**Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**	**100%**	**559.641.791**	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**		**Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**	**100%**	**482.011.780**	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah	325 Informasi 150 informasi	559.641.791	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun	325 Informasi	482.011.780	
								Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah	150 informasi		
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah wartawan yang ikut Diseminasi informasi Pemerintah Daerah	100 media	265.402.883	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah Informasi melalui Media Luar Ruang	50 buah	116.840.580	
			Jumlah Pemerintah Daerah yang dipublikasikan Advertorial pada media massa	150 berita				Jumlah Penggiat Medsos Mitra Pemerintah Daerah	30 orang		

	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah KIM yang dibina	60 kelompok	68.327.020	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Bimtek dan monev PPID yang dilaksanakan	1 kali	69.284.200	
								Jumlah Kelembagaan KIM yang terbentuk	15 KIM		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Informasi melalui Media Luar Ruangan	50 Buah	193.571.888	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Pemerintah Daerah	75 orang	295.887.000	
			Ccetak Kalender	1850 buah				Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan melalui Pemberitaan Advertorial pada Media Massa	150 informasi		
	URUSAN PERSANDIAN					**URUSAN PERSANDIAN**					
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		**Presentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**100%**	**126.985.898**	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**		**Presentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**100%**	**117.966.648**	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota		**Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi**	**100%**	76.386.450	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota**		**Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi**	**100%**	67.417.200	

	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		jumlah kebijakan keamanan informasi yang disusun	1 dokumen	9.238.845	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi Kebijakan Persandian yang dilaksanakan	1 Kali	39.297.000	
	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota		Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	53 PD	67.147.605	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota		Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	53 PD	28.120.200	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Kota		**Jumlah Sarana Prasarana yang diamankan**	**6 unit**	**50.599.448**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Kota**		**Jumlah Sarana Prasarana yang diamankan**	**6 unit**	**50.549.448**	
	Operasional jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jaring komunikasi sandi berbasis radio HT yang tersedia	3 Unit	50.599.448	Operasional jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan	3 Unit	50.549.448	
	URUSAN STATISTIK		**Dinas Kominfo Kab. Madiun**			**URUSAN STATISTIK**		**Dinas Kominfo Kab. Madiun**			
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		**Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid**	**85%**	**337.838.959**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**		**Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid**	**85%**	**345.053.960**	
	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/ kota		**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**337.838.959**	**Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/ kota**		**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**345.053.960**	
			Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	**1 sektor**				**Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi**	**1 sektor**		

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	6 Dokumen	114.850.976	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Statistik Sektoral yang tersedia	4 Dokumen	100.037.105	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Dokumen infografis yang tersusun	1 dokumen	222.987.983	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	36 sektor	245.016.855	
			Jumlah data dashboard yang tersedia	36 sektor				Jumlah Dokumen Statistik Sektoral yang tersusun	1 dokumen		
			Jumlah FGD yang dilaksanakan	2 kali							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2022 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinas Komunikasi Dan Informatika

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **"Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur".** Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing".** Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangung lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Madiun
1	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan layanan insfrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh organisasi selama periode 5 (lima) tahun dan merupakan sarana untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan sasaran adalah merupakan penjabaran operasional dari sebuah tujuan. Berikut adalah tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Tahun 2022.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2022
1	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	$\boldsymbol{Indeks\ SPBE} = \sum_{j=1}^{n} ND_j \times BD_j$	2,70
2		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	∑ aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi ----------x 100% ∑ aplikasi layanan publik berbasis elektronik	15,38 %

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan operasionalisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi untuk periode 1 (satu) tahun. Keberhasilan tujuan dan sasaran sangat tergantung pada penetapan program dan kegiatan serta implementasinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2022 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun pada tahun 2022 pada telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020. Ada 5 program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Informasi Dan Komunikasi Publik, (3) Program Aplikasi Informatika, (4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, (5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang dipilih tersebut untuk mendukung visi misi Kabupaten Madiun, meningkatkan SPBE, mensukseskan Satu Data Indonesia, meningkatkan keterbukaan informasi publik serta untuk pengamanan informasi.

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Madiun
Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		**Dinas kominfo Kab madiun**						
2	**16**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)**		**88**	**7.291.318.017**	**PAD, DBHCHT, DAU**		**90**	**7.513.911.358**
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah		**83**	**14.589.960**			**86**	**14.881.759**
2	16	1	2.02		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah**		**12 Bulan**	**4.022.491.858**	**DAU**		**12 Bulan**	**4.225.873.476**
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	4.022.491.858	**DAU**		12 Bulan	4.225.873.476
2	16	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah diseminasi informasi publik terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai yang sesuai dengan strategi komunikasi yang ditetapkan**		**50 informasi**	**2.308.240.000**	**DBHCHT**		**12 Bulan**	**2.308.240.000**
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Cetak kalender Pemkab Madiun		1667	2.308.240.000	**DBHCHT**		12 Bulan	2.308.240.000
						Jumlah sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai yang diselenggarakan melalui tatap muka, media luar ruang, media sosial		50 kali					

2	16	1	2.06		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi**		**12 Bulan**	**479.111.783**	**PAD**		**12 Bulan**	**488.694.019**
				02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		3 paket	154.776.875	PAD		3 paket	157.872.413
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan logistik kantor yang tersedia		12 Bulan	136.482.148	PAD		12 Bulan	139.211.791
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		12 Bulan	12.128.740	PAD		12 Bulan	12.371.315
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan		12 Bulan	6.334.020	PAD		12 Bulan	6.460.700
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan		12 Bulan	169.390.000	PAD		12 Bulan	172.777.800
2	16	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia**		**2 paket**	**7.487.384**	**PAD**		**2 paket**	7.637.132
				11	Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia		2 paket	7.487.384	PAD		2 paket	7.637.132
2	16	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik negara yang terpelihara**		**12 bulan**	**279.652.980**	**PAD**		**12 Bulan**	**285.246.040**
				02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia		12 Bulan	129.161.445	PAD		12 Bulan	131.744.674
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin yang terpelihara		20 unit	25.190.000	PAD		20 unit	25.693.800
				09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 buah	125.301.535	PAD		1 buah	127.807.566
2	16	01	2.08		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**12 Bulan**	**194.334.012**	**PAD**		**12 Bulan**	**198.220.692**
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon		12 Bulan	64.406.464	PAD		12 Bulan	65.694.593

				04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor (tenaga keamanan, kebersihan, resepsionis, administrasi dan pengemudi)		8 orang	129.927.548	PAD		12 Bulan	132.526.099
2	16	01	2.01		**Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun**		**21 dokumen**	**14.589.960**	**PAD**		**21 dokumen**	**14.881.759**
				01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan bidang komunikasi, aplikasi informatika, persandian dan statistik yang tersusun		21 dokumen	14.589.960	PAD		21 dokumen	14.881.759
2	16	03			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE**		**100%**	**2.050.012.389**	**PAD**		**100%**	**1.424.598.361**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nama Domain Perangkat Daerah**		**53 PD**	**1.207.970.000**	**PAD**		**53 PD**	**485.514.623**
				03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun		32 PD	1.207.970.000	PAD		32 PD	485.514.623
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus**		**100%**	**842.042.389**	**PAD**		**100%**	**939.083.738**
				03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Presentase Service Level Agrement		100%	528.374.445	PAD		100%	588.000.000
				01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah		53 PD	93.002.400	PAD		53 PD	83.925.828
						Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e-Government		1 Kebijakan				1 Kebijakan	
						Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di bidang TIK		5 orang				5 orang	

				07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi e-Government yang dibangun & dikembangkan		3 Aplikasi	220.665.544	PAD		3 Aplikasi	267.157.910
2	16	02			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**		**100%**	**482.011.780**	**PAD**		**10%**	**481.866.809**
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun		325 Informasi	482.011.780	PAD			481.866.809
						Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah		150 informasi					
				08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Informasi melalui Media Luar Ruang		60 buah	116.840.580	PAD		60 buah	278.673.027
						Jumlah Penggiat Medsos Mitra Pemerintah Daerah		30 orang				30 orang	
				06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek dan monev PPID yang dilaksanakan		1 kali	69.284.200	PAD		1 kali	70.669.884
						Jumlah Kelembagaan KIM yang terbentuk		15 KIM				15 KIM	
				05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Pemerintah Daerah		75 orang	295.887.000	PAD		75 orang	203.193.782
						Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan melalui Pemberitaan Advertorial pada Media Massa		150 berita				150 berita	
					URUSAN PERSANDIAN		**Dinas kominfo Kab madiun**						
2	21	02			**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Presentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**		**100%**	**117.966.648**	**PAD**		**100%**	**120.325.981**
2	21	02	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi**		**100%**	67.417.200	**PAD**		**100%**	68.765.544

				01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Persandian yang dilaksanakan		1 Kali	39.297.000	PAD		1 kali	40.082.940
				04	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah		53 PD	28.120.200	PAD		53 PD	28.682.604
2	21	02	2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah Sarana Prasarana yang diamankan**		6 unit	50.549.448	PAD		6 unit	51.560.437
				01	Operasional jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Operasional Pengamanan Informasi		3 Unit	50.549.448	PAD		3 Unit	51.560.437
					URUSAN STATISTIK	**Dinas Kominfo Kab. Madiun**							
2	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid**		**85%**	**345.053.960**	**PAD**		**85%**	**351.955.039**
2	20	02	2.01		**Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/ kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**		100%	345.053.960	PAD		100%	351.955.039
						Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi		1 sektor				1 sektor	
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral yang tersedia		4 Dokumen	100.037.105	PAD		6 Dokumen	102.037.847
				04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia		36 sektor	245.016.855	PAD		1 survey	249.917.192
						Jumlah Dokumen Statistik Sektoral yang tersusun		1 dokumen				36 sektor	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan maka disusunlah Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun tahun 2022. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022. Renja perubahan ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2022	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
					URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2	**16**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)**	**88**	**4.968.822.010,00**	**88**	**1.925.045.510,00**	**88**	**294.511.014,00**	**88**	**117.529.443,00**	**88**	**7.305.907.977,00**
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah					**83**				**83**	
2	16	1	2.02		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**4.022.491.858**								
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.022.491.858								
2	**16**	**1**	**2.06**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah**	**10 informasi**	**393.066.250**	**20 informasi**	**1.764.230.750**	**20 informasi**	**150.943.000**			**50 informasi**	**2.308.240.000**
				02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		393.066.250		**1.764.230.750**	**1667 exp**	**150.943.000**			1667 exp	**2.308.240.000**

				04		Jumlah diseminasi informasi publik terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai yang sesuai dengan strategi komunikasi yang ditetapkan	10 kali		20 kali		20 kali				50 kali	
2	16	1	2.06		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi**	**3 bulan**	**227.321.175,00**	**3 bulan**	**92.588.500,00**	**3 bulan**	**80.382.258,00**	**3 bulan**	**78.819.850,00**	**12 bulan**	
				02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	142.567.975	2 paket	12.208.900					3 paket	154.776.875
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan logistik kantor yang tersedia	3 bulan	37.787.350	3 bulan	33.413.750	3 bulan	33.416.408	3 bulan	31.864.640	12 bulan	136.482.148
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3 bulan	3.036.000	3 bulan	3.036.000	3 bulan	3.036.000	3 bulan	3.020.740	12 bulan	12.128.740
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	3 bulan	1.582.350	3 bulan	1.582.350	3 bulan	1.582.350	3 bulan	1.586.970	12 bulan	6.334.020
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	3 bulan	42.347.500	3 bulan	42.347.500	3 bulan	42.347.500	3 bulan	42.347.500	12 bulan	169.390.000
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia**	**3 paket**	**7.487.384**							**1 paket**	**7.487.384**
				11	Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	3 paket	7.487.384							1 paket	7.487.384

2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia**	**3 bulan**	**164.464.535**	**3 bulan**	**39.163.000**	**3 bulan**	**39.163.000**	**3 bulan**	**36.862.445**	**12 bulan**	**279.652.980**
				02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	3 bulan	32.865.500	3 bulan	32.865.500	3 bulan	32.865.500	3 bulan	30.564.945	12 bulan	129.161.445
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin yang terpelihara	5 unit	6.297.500	5 unit	6.297.500	5 unit	6.297.500	5 unit	6.297.500	20 unit	25.190.000
				09	Pemeliharaan/reha bilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	125.301.535							1 unit	125.301.535
2	16	01	2.08		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**3 bulan**	**151.398.548**	**3 bulan**	**21.471.000**	**3 bulan**	**21.464.464**	**3 bulan**	**0**	**12 bulan**	**194.334.012**
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon	3 bulan	21.471.000	3 bulan	21.471.000	3 bulan	21.464.464	3 bulan		12 bulan	64.406.464
				04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor (tenaga keamanan, kebersihan, resepsionis, administrasi dan pengemudi)	8 orang	129.927.548	8 orang		8 orang		8 orang		8 orang	129.927.548
2	16	01	2.01		**Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun**	**3 dokumen**	**2.592.260**	**7 dokumen**	**7.592.260**	**7 dokumen**	**2.558.292**	**4 dokumen**	**1.847.148**	**21 dokumen**	**14.589.960**

				01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan bidang komunikasi, aplikasi informatika, persandian dan statistik yang tersusun	3 dokumen	2.592.260	7 dokumen	7.592.260	7 dokumen	2.558.292	4 dokumen	1.847.148	21 dokumen	14.589.960
2	16	03			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE**	**100%**	**660.100.044**		**674.990.845**		**385.927.500**		**328.994.000**	**100%**	**2.050.012.389**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah nama domain Perangkat Daerah**	**53 PD**	**301.992.000**		**301.992.000**		**301.992.000**		**301.994.000**	**53 PD**	**1.207.970.000**
				03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kabupaten Madiun	32 PD	301.992.000		301.992.000		301.992.000		301.994.000	32 PD	1.207.970.000
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus**	**100%**	**358.108.044**		**372.998.845**		**83.935.500**		**27.000.000**	**100%**	**842.042.389**
				03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Presentase Service Level Agrement	100%	260.500.000		246.874.445		10.500.000		10.500.000		528.374.445
				01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	53 PD	15.870.400		60.191.000		9.441.000		7.500.000		93.002.400

						Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e-Government			1 kebijakan							
						Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di bidang TIK			5 orang							
				07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi e-Government yang dibangun & dikembangkan	1 aplikasi	81.737.644	1 aplikasi	65.933.400	1 aplikasi	63.994.500		9.000.000	3 aplikasi	220.665.544
2	**16**	**02**			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**	**100%**	**236.032.900**		**142.229.580**		**87.109.400**		**16.639.900**	**100%**	**482.011.780**
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun	25 informasi	236.032.900	100 informasi	142.229.580	100 informasi	87.109.400	100 informasi	16.639.900	325 informasi	482.011.780
						Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah	30 informasi		40 informasi		40 informasi		40 informasi		150 informasi	
				08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Informasi melalui Media Luar Ruang	10 buah	52.900.000	10 buah	53.380.380	20 buah	10.560.200	10 buah		50 buah	116.840.580
						Jumlah Penggiat Medsos Mitra Pemerintah Daerah	30 orang								30 buah	
				06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek dan monev PPID yang dilaksanakan		17.325.900	1 kali	24.069.200		12.899.200		14.989.900		69.284.200

						Jumlah Kelembagaan KIM yang terbentuk			15 KIM							
				05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Pemerintah Daerah	75 orang	165.807.000		64.780.000		63.650.000		1.650.000	75 orang	295.887.000
						Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan melalui Pemberitaan Advertorial pada Media Massa	20 informasi		50 informasi		40 informasi		40 informasi		150 informasi	
					URUSAN PERSANDIAN											
2	21	02			**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Presentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	100%	83.529.000	100%	19.924.200	100%	10.232.000	100%	4.281.448	100%	117.966.648
2	21	02	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi**	100%	43.529.000	100%	15.424.200	100%	4.232.000	100%	4.232.000	100%	67.417.200
				01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Persandian yang dilaksanakan	1 kali	39.297.000								39.297.000
				04	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	53 PD	4.232.000	53 PD	15.424.200	53 PD	4.232.000	53 PD	4.232.000	53 PD	28.120.200
2	21	02	2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah Sarana Prasarana yang diamankan**	6 unit	40.000.000		4.500.000		6.000.000		49.448		50.549.448

				01	Operasional jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Operasional Pengamanan Inforrmasi	3 unit	40.000.000		4.500.000		6.000.000		49.448		50.549.448
					URUSAN STATISTIK	**Dinas Kominfo Kab. Madiun**										
2	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid**	**85%**	**127.164.808**		**74.398.152**		**30.962.750**		**112.528.250**		**345.053.960**
2	20	02	2.01		**Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/ kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	100%	127.164.808		74.398.152		30.962.750		112.528.250	100%	345.053.960
						Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi										
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen statistik Sektoral yang tersedia		33.679.255	2 dokumen	39.942.850	2 dokumen	26.415.000		0	4 dokumen	100.037.105
				04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia		93.485.553	36 sektor	34.455.302		4.547.750		112.528.250		245.016.855
						Jumlah Dokumen Statistik Sektoral yang tersusun	1 dokumen									

BAB V PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan komitmen bersama yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika yang kemudian dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun terutama pada misi ke 2.

Demikian Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun ini, semoga bermanfaat dalam rangka pembangunan Kabupaten Madiun.

Madiun, 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN

Drs. SAWUNG REHTOMO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700825 199003 1 001

			97,52
TUJUAN	**:**	**Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	
Indikator	**:**	**Indeks SPBE**	